



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI V DPR RI**

**(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT,  
PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN KAWASAN TERTINGGAL, BADAN METEOROLOGI,  
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, BADAN NASIONAL PENCARIAN  
DAN PERTOLONGAN/BASARNAS**

---

Tahun Sidang	: 2022 – 2023
Masa Sidang	: III
Rapat	: Ke – 2
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Hari/Tanggal	: Selasa, 17 Januari 2023
Sifat	: Terbuka
Pukul	: 13.30 WIB s.d 18.15 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi V (Ruang KK V), Gedung Nusantara DPR RI
Acara	: 1. Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2022 Kementerian PUPR; 2. Membahas Program Kerja Tahun 2023; 3. Dan Lain-lain
Ketua Rapat	: Lasarus, S.Sos.,M.Si
Sekretaris	: Nunik Prihatin Budiastuti, SH
Hadir Anggota	: .... dari 57 orang Anggota Komisi V DPR RI secara fisik dan Virtual
Hadir Mitra	: Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat beserta jajaran

**KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT**

**I. PENDAHULUAN**

1. Rapat dibuka pada pukul 13.30 WIB setelah kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan bahwa Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri PUPR hari ini adalah Membahas Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2022 Kementerian PUPR, membahas Program Kerja Tahun 2023 dan Lain-lain.
3. Ketua Rapat mempersilakan kepada Menteri PUPR untuk menyampaikan paparan dan penjelasannya.
4. Ketua Rapat mempersilakan kepada Anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan pertanyaan dan tanggapan.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT:

1. Terkait dengan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kementerian PUPR dalam APBN TA 2022:

a. Komisi V DPR RI memberikan apresiasi atas capaian realisasi dalam TA 2022 sebagai berikut:

Kementerian	Realisasi Keuangan TA 2022	Realisasi Fisik TA 2022
Kementerian PUPR	93,7%	96,2%

b. Terhadap program/kegiatan di TA 2022 yang tidak terealisasi, Komisi V DPR RI meminta Kementerian PUPR agar menyelesaikan permasalahan dan kendala teknis pada pelaksanaan program/kegiatan TA 2022, sehingga tidak terulang kembali pada Tahun Anggaran berikutnya.

2. Komisi V DPR RI meminta Kementerian PUPR untuk:

- mempercepat pendataan dan perbaikan infrastruktur yang rusak pasca bencana alam;
- meningkatkan sistem monitoring, evaluasi dan koordinasi untuk memaksimalkan pelaksanaan program dan anggaran TA 2023;
- mempercepat realisasi program infrastruktur berbasis masyarakat; dan
- mengutamakan Produk Dalam Negeri (PDN) pada pembangunan infrastruktur.

3. Komisi V DPR RI meminta Kementerian PUPR untuk mempercepat penyelesaian penyusunan Peraturan pelaksana dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Undang-Undang No.17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.

4. Terkait dengan pengawasan terhadap program dan anggaran Kementerian PUPR, Komisi V DPR RI akan melaksanakan Rapat Internal untuk menentukan tindak lanjutnya.

## III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 18.15 WIB.

Jakarta, 17 Januari 2023

**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT,**



**M. BASOEKI HADIMOELJONO**

**KETUA RAPAT,**



**L A S A R U S**